

INDIGENISASI STRUKTUR KEKUASAAN DALAM PENANGANAN MASALAH LINGKUNGAN DI KOTA AMBON (STUDI LEMBAGA KEWANG LINGKUNGAN DI KOTA AMBON)

Prapti Murwani¹, Tonny D. Pariela², Simona Ch. Litaay³

^{1,2,3}Universitas Pattimura, prapti.murwani@fisip.unpatti.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang keberadaan kewang sebagai struktur kekuasaan adat yang diadopsi menjadi struktur pemerintahan modern. Lembaga kewang diakomodir dalam pengelolaan lingkungan di Kota Ambon sebagai bentuk pelaksanaan partisipasi pembangunan yang partisipatif. Agar partisipasi masyarakat lokal dapat menjadi kekuatan dalam melakukan pembangunan maka diperlukan pendekatan dengan perspektif indigenous. Pembangunan yang digerakkan dengan mengakomodir konsep lokal akan menjadi kekuatan penggerak yang efektif. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki kearifan lokal yang sangat baik untuk diakomodir dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah kewang yang memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat dalam mengelola lingkungan. Oleh sebab itu, kewang sebagai bentuk transformasi struktur kekuasaan tradisional ke dalam pemerintahan adat akan dapat efektif dalam mengelola lingkungan di kota Ambon. . Konsep kewang sebagai simbol adat memiliki nilai adat yang kekuatannya masih diyakini dan dipercaya oleh masyarakat. Kewang sebagai bentuk dari simbol engine akan menjadi kekuatan dalam menggerakkan partisipasi di masyarakat yang berada di kota Ambon Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan indigenous perspektif, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam selama 3 bulan di lapangan.

Kata kunci: Kewang; Perspektif budaya ; Indigenis; Lingkungan; Kearifan lokal

1. PENDAHULUAN

Maluku adalah merupakan salah satu wilayah kepulauan dengan karakter wilayah yang sangat unik dan multikultur bahkan sangat resisten terhadap masalah lingkungan. Disisi lain pelaksanaan pembangunan yang sementara berjalan lebih bersifat kapitalis,, yang menitikberatkan pada masalah untung rugi saja. Oleh sebab itu apabila pelaksanaan pembangunan tidak tepat maka akan menimbulkan kerusakan dari lingkungan di wilayah kepulauan. Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting untuk mengantisipasi permasalahan lingkungan yang ditimbulkan.

Kewang adalah merupakan salah satu lembaga adat yang memiliki tugas dan peran dalam mengelola lingkungan. Keberadaan kewang di negeri-negeri adat di Kota Ambon, dewasa ini sudah semakin hilang. Fungsi dan peran kewang dalam pengawasan hutan di negeri-negeri adat hampir dikatakan sudah tidak ada. Padahal kewang memiliki fungsi yang strategis dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Keberadaan kewang di wilayah-wilayah adat sangat efisien dalam melindungi sumber daya alam yang berada di wilayah darat maupun laut. Hal ini terjadi tidak luput dari pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyebutan Negeri yang identik dengan pemerintahan adat membawa dampak pada pelaksanaan tata pemerintahan di wilayah-wilayah adat. Oleh sebab itu peran dan fungsi dalam pelaksanaan pemerintahan adat mulai hilang. Bahkan beberapa negeri adat di wilayah Kota Ambon dilakukan secara modern akibatnya beberapa fungsi dan peran dalam pemerintahan adat hilang. Sementara Maluku

adalah merupakan wilayah kepulauan dengan kekuasaan adat yang sangat kuat. Ketaatan masyarakat terhadap adat yang menjadi kosmos kehidupan mereka masih diyakini sampai sekarang. Hal ini tidak terlepas dari kekuatan supranatural yang masih menjadi keyakinan pada masyarakat yang tinggal di wilayah adat, apabila melanggar aturan maka akan mendapatkan sanksi dari para leluhur mereka. Dan hal ini menjadi kekuatan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Oleh sebab itu, penting untuk mengakomodir konsep kewang dalam pemerintahan modern. Perspektif Indigineouse memandang bahwa potensi lokal merupakan faktor yang dapat menggerakkan kekuatan pembangunan. Konsep lokal yang sudah familier di dalam masyarakat ketika diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di wilayah kepulauan akan menjadi kekuatan dalam proses pembangunan. Berbeda jika proses pembangunan yang diadopsi dari luar maka akan terjadi blain spot, artinya masyarakat tidak akan dapat melakukan apapun karena mereka tidak pernah mengenal konsep asing yang diterapkan dalam proses pembangunan. Tunker menjelaskan dalam culture perspektifnya bahwa pemikirannya adalah merupakan kritikan terhadap modernisasi. Tunker melihat bahwa faktor budaya selama ini hilang dalam proses pembangunan, padahal budaya merupakan hal penting agar masyarakat tidak mengalami blind spot (Tucker dalam Munck and O'Hearn, 1992; 2). Artinya bahwa masyarakat tidak akan mengalami kemandekan karena konsep-konsep yang dikenalnya dianggap baru. Berbeda dengan ketika konsep dalam pelaksanaan pembangunan sudah biasa mereka dengar, mereka akan jadikan sebagai bentuk pemberdayaan sosial dalam mendukung pembangunan. Masyarakat memiliki kekuatan sebagai penggerak pembangunan. Hal ini karena pada dasarnya masyarakat lokal memiliki kearifan lokal yang menjadikan mereka tetap survive sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu menarik untuk dilihat bagaimana konsep kewang sebagai lembaga adat mampu menjadi sumber kekuatan dalam menggerakkan pembangunan?

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011; 6). Selanjutnya Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara 8 informan baik dari 3 unsur masyarakat, 3 kewang dan 2 orang stakeholder. Selanjutnya observasi serta dokumentasi juga dilakukan guna memberikan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan informan dengan menggunakan metode purposive, yaitu memilih informan dengan menunjuk langsung. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Januari-Maret 2023. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara

3. ANALISIS DATA

Kota Ambon adalah merupakan wilayah kepulauan. Implikasi sosiologis dari wilayah kepulauan adalah, komunitas hidup di pulau-pulau kecil. Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau menjadikan pulau sebagai arena aktivitas mereka. Seandainya pulau dijadikan sebagai arena aktivitas maka akan rentan terhadap adanya perubahan. Sementara pembangunan adalah merupakan perubahan yang disengaja, maka dari itu apabila pembangunan dilakukan tidak bertanggung jawab maka akan hancur ekosistem pulau tersebut. Oleh karena itu masyarakat-masyarakat adat yang tinggal di pulau tersebut, sejak dahulu memiliki kearifan lokal. Sebagai contoh, masyarakat adat membuat Kewang, ternyata kewang tersebut dibuat untuk menjaga lingkungan, agar semua aktivitas yang dilakukan di wilayah pulau tidak memiliki dampak terhadap lingkungan mereka. Disisi lain sekarang kita masuk pada pembangunan modern,

ancaman terhadap lingkungan sangat tinggi karena adanya ideologi kapitalis. Dalam pemikiran kapitalis mengeksploitasi lingkungan semaksimal mungkin, tidak memperhatikan dampaknya yang penting mereka mendapatkan keuntungan. Maka dari itu partisipasi masyarakat perlu dilakukan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan indigenous perspektif. Indigenous perspektif adalah memasukkan konsep lokal ke dalam proses pembangunan. Hal ini penting dilakukan karena apabila memasukkan nilai baru yang tidak familiar maka akan menimbulkan *blain spot*, maka akan kehilangan *symbolic engine* sebagai kekuatan yang berbasis pada struktur sosial dan kultural lokal (Pariela, 2009; 4) Disisi lain eksistensi lembaga adat sudah mulai hilang. Beberapa lembaga adat seperti kewang di sebagian wilayah adat sudah tidak ditemukan lagi. Sasi sebagai bentuk larangan yang diberlakukan di negeri adat juga sudah mulai hilang. Hal ini tidak terlepas dari UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Oleh sebab itu mengadopsi nilai lokal sangat penting sebagai kekuatan untuk menggerakkan pembangunan. Disatu sisi identitas lokal masyarakat kepulauan tetap terpelihara dengan baik.

Pemerintah Kota Ambon mencoba melakukan transformasi peran atau indiginisasi struktur kekuasaan dengan mengadaptasi lembaga kewang. Kewang dengan peran tradisionalitasnya ditransformasikan menjadi bagian dari struktur kekuasaan pemerintah Kota Ambon. Selanjutnya fungsi dan peran kewang dirasionalisasikan dalam pelaksanaan di pemerintah modern sesuai dengan kebutuhan. Kewang adalah merupakan lembaga yang ada di dalam struktur pemerintahan adat. Dalam perkembangannya, wilayah Kota Ambon mengalami pergeseran dan fungsi dari wilayah, Hannigan menjelaskan bahwa di dalam wilayah perkotaan terbagi menjadi 3 fungsi yaitu Living Space, Supply depot dan Waste repository (Hannigan, 2006; 19). Ketika proses migrasi masuk ke wilayah perkotaan terjadi, maka 3 wilayah tersebut akan melebar sehingga akan keluar dari batas yang ditentukan, fungsi dari ketiganya akan berubah. Akibatnya akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Hal ini karena wilayah yang seharusnya bukan merupakan wilayah pembuangan sampah maka akan menjadi wilayah pembuangan sampah, begitu sebaliknya. Bahkan wilayah-wilayah yang bukan merupakan wilayah pemukiman dijadikan wilayah pemukiman, karena wilayah pemukiman sudah tidak dapat menampung orang untuk tinggal di wilayah tersebut. Kondisi tersebut akan menjadi masalah di wilayah perkotaan, khususnya di wilayah perkotaan di pulau kecil karena jumlah daratan lebih kecil dibanding dengan jumlah lautan. Di Kota Ambon, wilayah-wilayah laut yang seharusnya bukan untuk tempat tinggal sekarang sudah dijadikan tempat tinggal bahkan tercipta wilayah pemukiman kumuh di sepanjang bibir pantai.

Fenomena yang terjadi di Kota Ambon adalah munculnya pemukiman-pemukiman baru seperti di atas laut sehingga kondisi ini akan menimbulkan masalah dengan pembuangan sampah dan masalah lingkungan lainnya. Untuk menangani masalah lingkungan, selanjutnya Kota Ambon mencoba mempraktikkan gagasan tentang pembangunan berbasis potensi lokal dengan menggunakan sumber daya lokal dan sumber daya sosial. Kewang merupakan sumber daya sosial yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Ambon dalam mengelola lingkungan. Pemanfaatan kewang ini hampir sama dengan pacalang yang ada di Bali, memanfaatkan pacalang yang merupakan lembaga adat sebagai bagian dari struktur pemerintahan negara. masyarakat lebih taat dengan pacalang dibandingkan dengan polisi. UU tentang desa/ negeri No 6 tahun 2014 tentang desa/ negeri merupakan bagian tentang indigenisasi, yang menampung negeri atau dengan nama lain. Kewang merupakan indigenous kekuasaan yang memiliki wewenang dalam pengaturan masalah lingkungan di Kota Ambon.

Kewang lingkungan hidup di Kota Ambon dibentuk berdasarkan keputusan walikota No. 753 Tahun 2012. Kewang lingkungan di Kota Ambon sebanyak 120 Kewang lingkungan hidup yang berasal dari negeri atau desa dan kelurahan di Lima Kecamatan di Kota Ambon yang terdiri dari 29 kewang asal Kecamatan Nusaniwe. 38 kewang kecamatan Sirimau, 19 orang

dari Kecamatan Teluk Ambon Baguala, 16 kewang dari kecamatan Leitimur Selatan. Kewang lingkungan yang ditugaskan di Kota Ambon bertugas secara sukarela yang mengamankan lingkungan di lingkup pemerintah maupun di Kawasan hutan yang ada di Ambon. Polisi Lingkungan ini mengawasi setiap kegiatan di pusat budaya atau situs bersejarah. Mereka akan bertugas dalam setiap tugasnya melibatkan 10-20 orang, dengan waktu tugasnya dibagi menjadi 2 shift yaitu pagi jam 10.00-22.00 dan malam hari dengan berpakaian pakaian khas. Fungsi dan tugas kewang dalam mendukung pengelolaan lingkungan di Kota Ambon cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dari perolehan penghargaan Kalpataru di Kota Ambon.

Indiginousesasi ini menjadi hal yang penting karena peran serta masyarakat dilibatkan khususnya eksistensi masyarakat adat dapat terangkat Kembali. Sebagaimana dijelaskan dalam Pariela Apabila Kepentingan lebih besar dibandingkan derajat keintiman, maka akan tercipta jarak sosial yang cukup jauh sehingga potensial melahirkan konflik, dilain pihak bila derajat keintiman lebih tinggi dibandingkan derajat kepentingan, maka masyarakat akan memiliki jarak sosial yang kecil tetapi cenderung bersifat apatis karena tidak mempunyai kepentingan bersama yang akan mendorong mereka untuk bekerjasama. (Pariela, 2008; 238). oleh sebab itu apabila kepentingannya rendah dan keintimannya tinggi maka pemberdayaan masyarakat tidak akan terjadi. Aksi bersama bisa bergerak kalau ada keseimbangan antara keintiman dan kepentingan baru ada kolektif action. Masyarakat harus memiliki kepentingan terhadap lingkungan dan kalau masyarakat memiliki kepentingan terhadap lingkungan didukung oleh derajat keintiman yang tinggi maka orang akan bergerak untuk menjaga lingkungannya. Jadi pendekatan sosiologis menganjurkan agar keintiman sebagai modal sosial dalam hal ini trust dengan kepentingan yang kuat akan mendorong perilaku terhadap memperlakukan lingkungan. Indigenous kekuasaan kewang juga tampak dari pakaian yang digunakan. Pakaian dari kewang lingkungan hidup di kota mengakomodir dari pakaian adat salah satu cirinya adalah kain merah yang diikatkan di kepala. Identitas pakaian adat ini memperkuat makna adat yang menjadi simbol dari anak negeri yang diyakini oleh masyarakat di Ambon.

Proses transformasi peran kewang dari struktur pemerintahan adat ke struktur pemerintahan modern itu juga dimaksudkan sebagai *symbolic engine* sebagai kekuatan dalam masyarakat. *Symbolic Engine* ini adalah berupa kekuatan sosial budaya, lembaga-lembaga, nilai-nilai. *Symbolic Engine* diartikan sebagai aset sosio cultural dan modal sosial yang mencerminkan kekuatan suatu masyarakat untuk berkemang atau mengembangkan dirinya atas dasar orientasi nilai-nilai local (Pariela, 2009; 4). Pemerintah Kota Ambon menggunakan kekuatan sosial kultural dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Seandainya pemerintah kota Ambon tidak melakukan indiginisasi maka akan menciptakan *blind spot*, karena lembaga baru yang tidak diakrapi. Dalam Perspektif Sosiologi, *Blind Spot* mengindikasikan adanya alienasi akibat ketidakmampuan atau kegagalan beradaptasi dengan modernisasi. Berbeda Ketika istilah kewang yang sudah merupakan hal yang familiar di masyarakat adat maka ketika diterapkan pada pemerintahan modern maka akan menjadi kekuatan baru dalam menggerakkan pembangunan.

Keberadaan kewang lingkungan yang diakomodir dari lembaga adat akan sangat efektif dalam menangani permasalahan yang timbul pada masyarakat di Kota Ambon. Hal ini tidak terlepas dari ketaatan masyarakat terhadap adat yang masih sangat kuat. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kota Ambon adalah masyarakat yang berasal dari negeri-negeri adat yang berada disekitar Pulau Ambon. Kosmologi mereka sebagai anak negeri , memberikan ruang nilai-nilai negeri menjadi bagian dari budaya dalam (*inner culture*) yang tersimpan aktif di bawah alam sadar kolektif mereka. Watloly menjelaskan bahwa gagasan fundamental kosmologi negeri dengan nilai-nilai yang sifatnya abstrak akan tetapi memberikan spirit dalam tata kehidupan dan sejarah kehidupan yang nyata (Watloly, 2013;5). Kenyataan itulah yang membuat setiap generasi anak negeri selalu memiliki keterikatan yang subyektif-emosional dengan negerinya, meskipun mereka telah merantau jauh dan sukses membangun hidup di

negeri lain. Nilai subyektif dalam kosmologi menetap di dalam diri manusia sebagai nilai-nilai kebenaran. Oleh sebab itu pelaksanaan kewang dapat berlangsung dengan baik. Se jauh mana kesadaran kolektif begitu kuat dianut, diyakini serta dilaksanakan secara bersama, teratur dan konsisten dalam membangun sebuah kehidupan yang aman dan berdamai sejahtera dan berkelanjutan. Keberadaan kewang di Kota Ambon juga ditunjukkan dengan cara mereka berpakaian. Pakaian adat sebagai simbol identitas adat di Maluku dikenakan. Hal ini memberikan nuansa adatis yang diyakini dan dipedomani oleh sebagian besar masyarakat yang berasal dari wilayah kepulauan.

Masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan sangat identik dengan simbol yang diyakini memiliki nilai-nilai adat yang luhur dan memiliki kesakralan dalam mengatur kehidupan mereka. Oleh sebab itu, kewang yang selama ini disimbolkan sebagai polisi hutan yang mengatur pelaksanaan sasi dalam tatanan pemerintahan adat, selanjutnya diterapkan dalam pengelolaan lingkungan di Kota Ambon yang sistem pemerintahannya modern memiliki pengaruh bagi perilaku masyarakatnya. Konsep kewang yang secara general dikenal oleh masyarakat adat di Maluku masih sangat kuat, memberikan implikasi bagi ketaatan masyarakat yang tinggal di Kota Ambon.

Burger menambahkan tentang aspek sosial politik. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan variabel yang berlaku adalah variabel lingkungan, social dan economic development maka akan dicapai pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu maka peran masyarakat melalui peran kewang yang merupakan bagian dari masyarakat yang dimasukkan dalam struktur kekuasaan menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa kewang memiliki kemampuan dalam menggerakkan masyarakat secara partisipatif. Hal ini dikarenakan pembentukan kewang juga mengakomodir semua perwakilan dari masyarakat. Ketika sumber daya manusia melibatkan semua keterwakilan masyarakat maka rasa memiliki dan rasa ikut berpartisipasi dari masyarakat pun akan berbeda Ketika program kegiatan yang dilakukan bersifat *top down*.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah bahwa Kewang sebagai kearifan lokal masyarakat kepulauan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Kewang dalam pendekatan perspektif budaya merupakan Symbolic engine sebagai kekuatan kultural untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan di Kota Ambon. Kondisi ini tidak terlepas dari Maluku yang merupakan wilayah kepulauan dengan simbol-simbol adat yang menjadi kosmos bagi kehidupan masyarakat yang tinggal didalamnya. Oleh sebab itu dengan dengan mengadopsi nilai lokal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang diharapkan dapat terwujud.

Pembangunan Top down untuk wilayah-wilayah kepulauan tidak tepat untuk dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas dengan wilayah yang berbasis kepulauan memiliki karakter yang berbeda dengan wilayah kontinental. Oleh sebab itu pembangunan yang bottom up planning lebih tepat diterapkan di wilayah ini. Pendekatan dengan perspektif budaya akan menjadi point penting dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan Hasil Kalpataru yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Ambon karena peran kewang lingkungan hidup yang diterakan.

Pengakuan

—

REFERENSI

- Haninngan, John.2006. *Environmental Sociology*. New York; Routledge.
- Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Munck, Ronaldo and Dennis O’Hearn (eds). 1999, *Critical Development Theory: Contributions to a New Paradigm*, Zed Book, London and New York.
- Pariela. 2008. *Damai di tengah konflik Maluku. Preserved Social Capital Sebagai Basis Survival Strategi*. Salatiga; Universitas Kristen Satyawacana
- Pariela. 2009. *Plural Social Capital: Sumber Sosial Sebagai Basis Pembangunan Nasional*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar UNPATTI Tanggal 15 Agustus 2009).
- Tucker, Vincent.2002. *Cultural Perspective on Development*. Routledge; New York.
- Watloly. 2013. *Cermin Eksistensi Masyarakat Kepulauan dalam Pembangunan Bangsa: Perspektif Indigenous Orang Maluku*. Jakarta; PT Intimedia Cipta Nusantara.